

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Dalam perkembangan ekonomi saat ini peranan akuntansi sangat penting untuk memutuskan sesuatu agar dalam menjalankan kegiatan tidak menimbulkan kerugian, terutama dalam menjalankan kegiatan-kegiatan dan transaksi-transaksi dalam sebuah perusahaan, contohnya seperti mencatat, melaporkan data ekonomi dalam sebuah perusahaan.

Akuntansi berfungsi sebagai informasi keuangan dalam sebuah perusahaan, sehingga dapat melihat posisi keuangan serta perubahan yang terjadi. Informasi keuangan sangat dibutuhkan khususnya oleh pihak manager atau manajemen untuk membantu pengambilan keputusan suatu organisasi. Pada dasarnya proses akuntansi adalah membuat laporan keuangan pada suatu perusahaan yang dasar pembuatannya telah diatur oleh peraturan agar mudah dibandingkan dengan laporan keuangan dari perusahaan atau organisasi lain.

Laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen kepada pemakai tentang pengelolaan yang dipercayakan kepadanya. Pemakai akan membaca laporan keuangan sebagai sebuah laporan pertanggungjawaban harus dapat dipahami dengan baik bagi para pemakai.

Dalam membuat laporan keuangan juga dikenal adanya standar yang harus dipatuhi. Standar tersebut diperlukan karena banyaknya pengguna laporan keuangan. Jika tidak terdapat standar, perusahaan dapat saja menyajikan laporan keuangan yang mereka miliki sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Tentunya akan menyulitkan pengguna untuk memahami laporan keuangan yang ada.

Di Indonesia memiliki empat jenis standar akuntansi yang menjadi acuan bagi perusahaan untuk membuat laporan keuangan, salah satunya standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP).

Standar Akuntansi keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik ( SAK ETAP ) merupakan standar akuntansi yang dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum ( *general purpose financial statement* ) bagi pengguna eksternal, contohnya pemilik

yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditor dan lembaga pemeringkat kredit (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2013)

Entitas dikatakan memiliki akuntabilitas publik signifikan jika entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal untuk tujuan penertbitan di pasar modal. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, reksa dana dan bank investasi. Entitas yang dimiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan SAK ETAP.

SAK ETAP diterbitkan karena Ikatan Akuntan Indonesia ( IAI ) menilai bahwa penyusunan laporan keuangan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ( PSAK ) berbasis IFRS ( *International Financial Reporting Standards* ) dinilai terlalu rumit dan akan menyulitkan pengusaha berskala kecil dan menengah, mengingat jenis usaha di Indonesia sebagian besar berskala kecil dan menengah. SAK ETAP disusun dengan mengadopsi IFRS for SME ( Small Medium Enterprises ) dengan modifikasi sesuai kondisi di Indonesia dan dibuat lebih ringkas. (Faraidhika et al., 2022)

Peraturan Bank Indonesia tersebut ditujukan dalam rangka peningkatan transparansi keuangan BPR dan penyusunan laporan keuangan yang relevan, komprehensif, andal dan dapat diperbandingkan, BPR wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang relevan bagi BPR.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntansi Indonesia ( DSAK-IAI) selain mengeluarkan PSAK 50 dan PSAK 55 juga menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik ( SAK ETAP ). (DSAK-IAI) dalam SAK ETAP menyatakan bahwa SAK ETAP dapat diberlakukan bagi entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan, sepanjang otoritas berwenang mengatur penggunaan SAK ETAP yang dimaksud. Berdasarkan hal tersebut, standar akuntansi keuangan bagi BPR menggunakan SAK ETAP. (Bank Indonesia, 2009)

Bank Perkreditan Rakyat yang biasa disingkat dengan BPR merupakan salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah dimana lokasinya berada dekat dengan masyarakat yang membutuhkan. Bank Perkreditan Rakyat merupakan lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR. Sebagai badan usaha yang

mengelola dari masyarakat, BPR memiliki tanggung jawab kepada publik dan dituntut untuk menyajikan laporan keuangan berkualitas, yang merupakan salah satu sumber informasi yang penting dalam pengambilan keputusan serta sebagai bentuk pertanggung jawaban manajemen atas aktivitas yang telah dilakukannya dalam kurun waktu tertentu. (Tim Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat, 2010)

Dalam rangka penyusunan laporan keuangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang relevan, komprehensif, andal dan dapat dibandingkan, BPR wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) sejak 1 Januari 2010. Penggunaan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan BPR mempertimbangkan bahwa BPR memiliki kegiatan usaha yang terbatas dan transaksi yang sederhana berdasarkan Undang-Undang Perbankan, sehingga penggunaan standar Akuntansi keuangan umum hanya berlaku bagi umum dipandang tidak sesuai dengan karakteristik operasional BPR dan mengakibatkan timbulnya biaya yang besar bagi BPR dibandingkan dengan manfaat apabila diterapkan oleh BPR. Pedoman Akuntansi BPR (PA-BPR) merupakan petunjuk pelaksanaan dari SAK ETAP yang memuat penjelasan dan contoh yang diharapkan mempermudah pemahaman terhadap SAK-ETAP bagi BPR.

Pemberlakuan PA-BPR diatur dalam surat edaran Bank Indonesia No. 12/14/DKBU tanggal 1 Juni 2010 perihal Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat. Aturan ini diterbitkan dengan Peraturan Bank Indonesia No. 08/20/PBI/2006 pada 5 Oktober 2006 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat dan surat Edaran BI No.11/37/DKBU pada 31 Desember 2009 perihal penetapan penggunaan Standar Akuntansi Keuangan bagi Bank Perkreditan Rakyat. (OJK, 2010)

OJK saat ini akan lebih memperkuat pengawasannya terhadap BPR, hal ini di buktikan dengan mulai dari Desember 2019 BPR tidak lagi memberikan laporan yang mencakup semua jenis laporan seperti halnya laporan keuangan kepada Bank Indonesia (BI). Namun, dilaporkan kepada OJK melalui Aplikasi laporan perbankan yang mana BI maupun Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga dapat mengakses laporan tersebut. Sejak tahun 2005 hingga juli 2019 sudah sebanyak 97 Bank yang dilikuidasi oleh LPS, bank tersebut terdiri dari 1 (satu) bank umum dan 96 (sembilan puluh enam) BPR. Likuidasi yang dilakukan oleh LPS ini dikarenakan adanya tindakan kecurangan yang dilakukan oleh banyak pihak, mulai dari nasabah hingga bagian direksi. Kecurangan yang dimaksud contohnya

melakukan manipulasi pada laporan keuangan, seperti kredit macet namun dilaporkan lancar ( Sindo News.com,2019)

Agar menjadi BPR yang unggul di masyarakat, BPR harus mampu menjaga kepercayaan dari masyarakat yang nantinya akan berdampak baik bagi perkembangan kegiatan usaha BPR di waktu mendatang. Dengan menyajikan laporan keuangan yang sebenarnya tentang kondisi keuangan perusahaan serta menerapkan SAK ETAP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun penelitian mengenai kesesuaian pada SAK ETAP pada penyusunan laporan keuangan BPR, seperti yang dilakukan (Sukma Maharani, 2020) ,hasil penelitiannya menunjukkan bahwa BPR Bank Brebes telah menerapkan SAK ETAP. Akan tetapi diharapkan dapat terus menyusun laporan perubahan ekuitas agar lebih mudah dipahami meskipun BPR telah menyajikan jurnal yang berhubungan dengan laporan perubahan ekuitas tersebut. Penelitian lain juga dilakukan oleh (Jovan R. Tamon, 2016) , menyimpulkan bahwa dalam penyajian laporan keuangan di PT. BPR Cipta Cemerlang Indonesia masih terdapat banyak ketidaksesuaian dengan SAK ETAP (2009). Sedangkan penelitian (Dayana Angriani Sitindaon, 2012) ,hasil analisisnya menunjukkan bahwa PT. BPR Wijaya Mulya Santosa sudah menerapkan SAK ETAP dan sudah membuat laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan SAK ETAP.

Dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang dilakukan pada PT. BPR tahap ganda Prabumulih . dan berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk menganalisis karena fenomena ini memunculkan pertanyaan tentang “ bagaimana penerapan laporan keuangan pada PT. BPR Tahap Ganda”. penulis melakukan analisis secara mendalam mengenai penerapan SAK ETAP Pada PT. BPR Tahap Ganda dengan judul penelitian, “Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Di PT. BPR Tahap Ganda Prabumulih” .

## **1.2 Rumusan Masalah**

Apakah penyajian laporan keuangan BPR Tahap Ganda Prabumulih sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) BPR

## **1.3 Tujuan Penelitian.**

Untuk mengkaji dan menganalisis apakah penyajian laporan keuangan BPR Tahap Ganda apakah sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)?.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1. Bagi Bank Perkreditan Rakyat**

Untuk memberikan masukan dan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

##### **2. Bagi Akademisi**

Memberi manfaat sebagai tambahan materi dan pengetahuan khususnya dalam bidang akuntansi tentang penerapan standar akuntansi yang dalam penelitian ini adalah SAK ETAP ke dalam laporan keuangan Bank Perkreditan Rakyat.

##### **3. Bagi Penulis**

Menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang Bank Perkreditan Rakyat khususnya penerapan SAK ETAP.

#### **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan yang ada maka dalam penulisan penelitian ini membahas tentang Analisis Penerapan SAK ETAP dalam penyusunan laporan keuangan di BPR Tahap Ganda.

#### **1.6 Sistematika Penulisan**

##### **BAB I           Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

##### **BAB II           Tinjauan Pustaka**

Bab ini berisi tentang teori-teori dari pustaka yang dapat dijadikan dasar pengelolaan data.

##### **BAB III          Metode Penelitian**

Bab ini berisi tentang objek penelitian, sumber data, sampel, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

##### **BAB IV          Hasil dan Pembahasan**

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum perusahaan, sejarah perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi perusahaan, produk, dan penyajian laporan keuangan perusahaan.

## **BAB V      Kesimpulan dan Saran**

Bab ini berisikan tentang kesimpulan atas pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya dan saran.

